

Manfaat Manajemen Kurikulum Pendidikan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah

Oleh : Drs. H.A. Hamdan, M.M

Pada era otonomi daerah dewasa ini dituntut kemandirian setiap Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembanguina dan pelayanan, sehingga perlu ada perencanaan pendapatan daerah yang sistimatis, terukur dengan output efisien dan efektif dalam pengelolaan penerimaan dana Pemerintah Daerah yang meliputi Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Di dalam UU nomor 33/2004 dinyatakan bahwa ***Pendapatan Daerah*** meliputi (1)Pendapatan Daerah Asli Daerah seperti halnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah (2)Dana Perimbangan seperti halnya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umu, Dana Alokasi Khusus (3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah. Sedangkan ***Pembiayaan*** meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Modul Bintek sumber PAD, 2007 :6)

Penulis selaku aparat pemerintah daerah yang mempunyai tupoksi sebagai Pelaksana kewenangan otononomi daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah. Dituntut untuk mampu menjalankan fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas;
- d. Pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah,

Disinilah diperlukan grand strategi yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Propinsi, RPJMD Kota Sukabumi, RKPD, KUA&PPAS, Renstra SKPD, Renja, Program, Kerja dan Kegiatan. Alhamdulillah setelah mendapat mata kuliah Manajemen Kurikulum dari Dr. Hari Suderajat, M.Pd, penulis mempunyai komparatif dan kerangka berfikir yang sistimatis, logis serta intergral karena di dalam komponen kurikulum itu meliputi standar tujuan, standar isi, standar proses dan standar evaluasi yang digambarkan dalam metric. Dari pemahaman metric yang dicontohkanle Dr.Hari Suderajat, M.Pd memberikan inspirasi untuk membuat Rencana Kerja danAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2009 dengan pembagian tugas pada setiap bidang, seksi dan para perlaksana untuk memperjelas delegasi authority dan delegasi responsibility dalam sebuah metric yang mudah dibaca dan mudah dipahami , siapa, berbuat apa, bagaiman, dimana, kapan. Sehingga tugas yang satu dengan tugas yang lainnya saling berkaitan tapi salaing menghargai hak dan kewajibannya masing-masing.

Bila tidak dibuatkan metric seperti yang dicontohkan oleh Dr. Hari Suderajat, M.Pd nampaknya sulit untuk memberikan transparansi kepada public karena pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Sukabumi relative kompleks, dari mulai pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, retribusi daerah, bagi hasil pajak dan non pajak, pendapatan lain-lain yang syah.

Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Fungsi Komponen	Planing	Organizing	Actuating	Controlling	Evaluating	
Tujuan						Standar Kompetensi
Materi						Standard Isi
Proses						Standard Prproses
Evaluasi						Standard Evaluasi/ Penilaian

Karena di dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk melakukan akuntabilitas public, jelas diperlukan standar tujuan dari pengelolaan penerimaan daerah sehingga kopetensinya bahwa setiap penerimaan harus terformulasikan dalam sebuah APBD yang penyusunannya harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan setiap tahun, seperti halnya untuk tahun 2008 dipersyaratkan memenuhi ketentuan Permendagri nomor 59 tahun 2007. isi/materi APBD tersebut harus mengacu pada standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 2005. kalau dalam pengelolaan pendidikan harus memenuhi standar nasional pendidikan diatur pada PP nomor 19 tahun 2005.

Ruanglingkup pengelolaan pendapatan daerah dipayungi oleh undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sedangkan ruang lingkup pendidikan nasional dipayungi oleh undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, sedangkan manajemen pendidikan digambarkan oleh Dr. Hari Suderadjat, M.Pd dalam sebuah matrik pula, hal ini memudahkan untuk dipahami. Sebelum mengetahui cara berfikir dalam menyederhanakan persoalan ke dalam sebuah metric, penulis sering menemukan persoalan yang tidak terlalu mudah untuk memecahkannya, karena yang namanya mengelola keuangan sangat rentan dengan berbagai penyimpangan dan bisa tergelincir dalam sebuah aturan yang selalu diubah setiap saat, bahkan untuk tahun anggaran 2009 sudah datang lagi permen nomor 32 tahun 2007 menggantikan permen nomor 59 tahun2006. disinilah diperlukan penyelarasan antara aturan satu dengan yang lainnya.

Ruang Lingkup(keluasan) Manajemen Pendidikan

		Manajemen					
S e k o l a h	Fungsi Komponen	Planing	Organizing	Actuating	Controlling	Evaluating	
	Kurikulum					Wakasek Bid.Kirikul	
	Siswa					Wakasek Bid.Kesis	
	Dana					TU	
	Guru					MGMP/	
	Sarana					Wakasek Bid.Sarana	
	Lingkungan					Wakasek Bid.Humas	
		Perencanaan Sekolah visi	Struktur Sekolah	Motivasi Sekolah	Pengawasan Sekolah	Evaluasi Sekolah	Kepala Sekolah

Dengan melihat materik seperti tersebut di atas memberikan gambaran pada penulis bahwa kompleksitas permasalahan dalam manajemen pendidikan bisa disederhanakan sehingga menggiring kita pada kemampuan mengkorelasikan secara integral antara fungsi manajemen dengan komponen pendidikan, disini nampak tugas dan tanggung jawab dari semua elemen, baik ditingkat top manajer, midel manajer lower manajer

Bila diimplementasikan dalam pengelolaan pendapatan daerah maka akan memudahkan dalam proses pemungutan sumber-sumber pendapatan bisa dievaluasi setiap saat dan ini merupakan alat bantu pimpinan dalam mengendalikan staf yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan daerah, baik dari mulai

1. **KEPALA DINAS**
2. **BAGIAN TATA USAHA** dengan 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
3. **BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN** dengan 4 Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pendataan dan Pelaporan
 - b. Seksi Pengolah Data dan Perhitungan
 - c. Seksi Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan
 - d. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
4. **BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN** dengan 4 Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Penagihan

- b. Seksi Pembukuan
- c. Seksi Keberatan dan Pelaporan
- d. Seksi Sistem Pelayanan Satu Atap (SPSA)

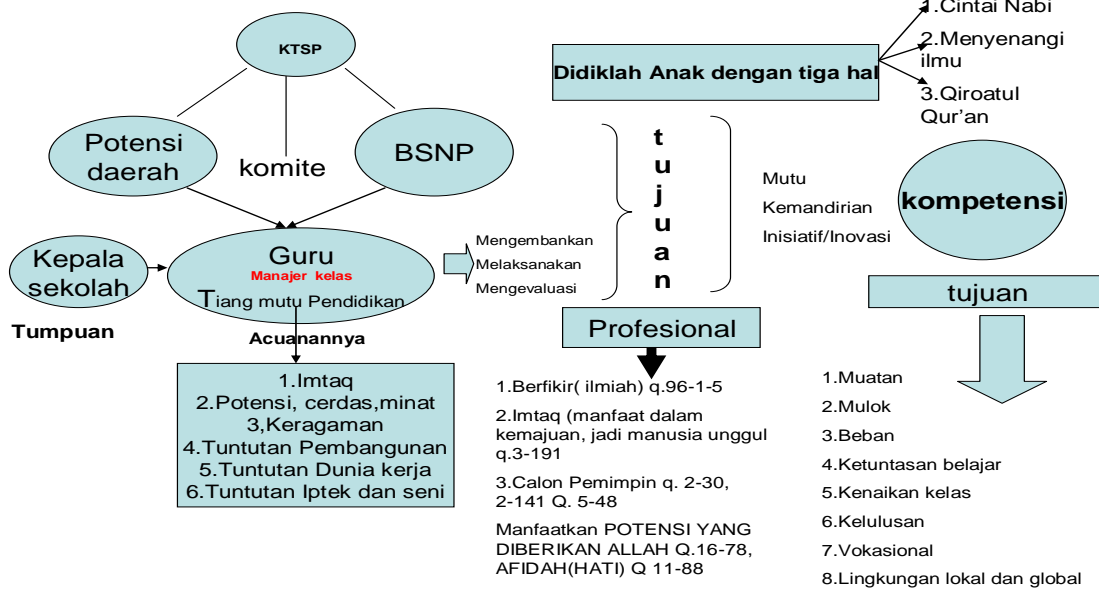
Penulis mencermati pendapat Dr. Hari bahwa "ada dua kunci utama peningkatan pendidikan, yaitu: **Pertama** adalah kurikulum sebagai ujung tombak perencanaan pendidikan yang perlu pematapan kearah pemberdayaan SDM yang kompetitif, **kedua** adalah profesionalisasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang berintikan nilai agama. Dalam hal ini termasuk kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang seharusnya menjadi tumpuan keberhasilan manajemen pendidikan di sekolah" maka dalam pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi ujung tombak perencanaannya adalah renja yang dijabarkan perangkaannya dalam RKA dan DPA sebagai jabaran dari RAPBD dan pemberdayaan SDM pada pengelolaan pendapatan daerah meliputi para kolektor sebagai fiskus dan tenaga administratif.

Lebih lanjut dalam perencanaan dan pengorganisasian materi yang meliputi (1) struktur mata pelajaran di sekolah (2) materi esensial mata pelajaran (3) pokok bahasan esensial, tema utama, (4) Sub pokok bahasan esensial, anak tema utama dilakukan evaluasi melalui (1)ujian akhir sekolah, uji kompetensi lulusan, (2)ujian sumatif mata pelajaran, ujian kompetensi mata pelajaran yang digambarkan oleh penguasaan beberapa standar kompetensi yang ditetapkan, (3)ujian formatif, uji stansar kompetensi yang digambarkan oleh penguasaan beberapa kompetensi dasar yang ditetapkan, (4)evaluasi ahir kegiatan belajar, digambarkan oleh pencapaian beberapa indikator belajar.

Sedangkan hasil perencanaan dan pengorgnisasi kurikulum telah dibahas tentang (1)Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), silabus, rencana pembelajaran dan adminisrasi guru (2) sarana pembelajaran siswa, yaitu modul pembelajaran siswa (software) media dan alat bahan pembelajaran siswa (hardware) (3)standar test. Untuk memberikan gambaran yang terintergrasi dalam kurikulumberbasis kompetensi dengan guru sebagai ujung tombaknya ditopang oleh Kepala sekolah sehingga guru mampu membuat silabus.

Apabila cara pemikiran seperti itu dianalogikan ke dalam sebuah pekerjaan Dinas Pendapatan Daerah, maka setiap bidang dan setiap seksi bahkan setiap pegawai dituntut untuk mampu membuat rencana pencapaian target pendapatan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun dalam sebuah **grand strategi** yang terintegrasi antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya, sehingga setiap pegawai tahu tugas pokok dan fungsinya masing, masing. Jadi membuat uraian tugas pokok tidak hanya saat mengajukan perubahan status dari TKK ke CPNS, dari CPNS ke PNS, dari PNS ke jabatan Seksi dari Jabatan Seksi ke Jabatan Kabid dari jabatan Kebid ke Jabatan Kadis tapi setiap saat harus terus memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, hal ini untuk membuktikan bahwa "**money folow fungtion**" akan menjadi sebuah kenyataan bukan retorika, bahkan tuntutan pembagian Upah Pungut yang adil akan terukur dengan sebuah ukuran kinerja yang aplikatif dan resenebel. Setiap orang akan mampu mengukur dan menghargai dirinya masing-masing sesuai standar kinerja.

KBK-----KTSP (perkembangan DARI kurikulum 76, 84, 94,2004)



Kalaulah pola pikir manajemen kurikulum diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif, korektif, evaluatif dan implementatif maka nilai yang terkandung dalam tugas sehari-hari diorientasikan pada sifat

- **Jujur** sebagai simbol dari akuntabel dan transparan;
- **Ikhlas** sebagai simbol dari Proporsional, professional, harmonis untuk memberi manfaat dalam meraih kesejahteraan bagi semua pihak;
- **Teratur** sebagai simbol dari pelaksanaan system dan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum;
- **Ulet** sebagai simbol dari rutinitas yang berkesinambungan dan progresif.

D = Dengan dilandasi Iman dan Taqwa

I = Insy Allah

P = Pekerjaan yang kita lakukan

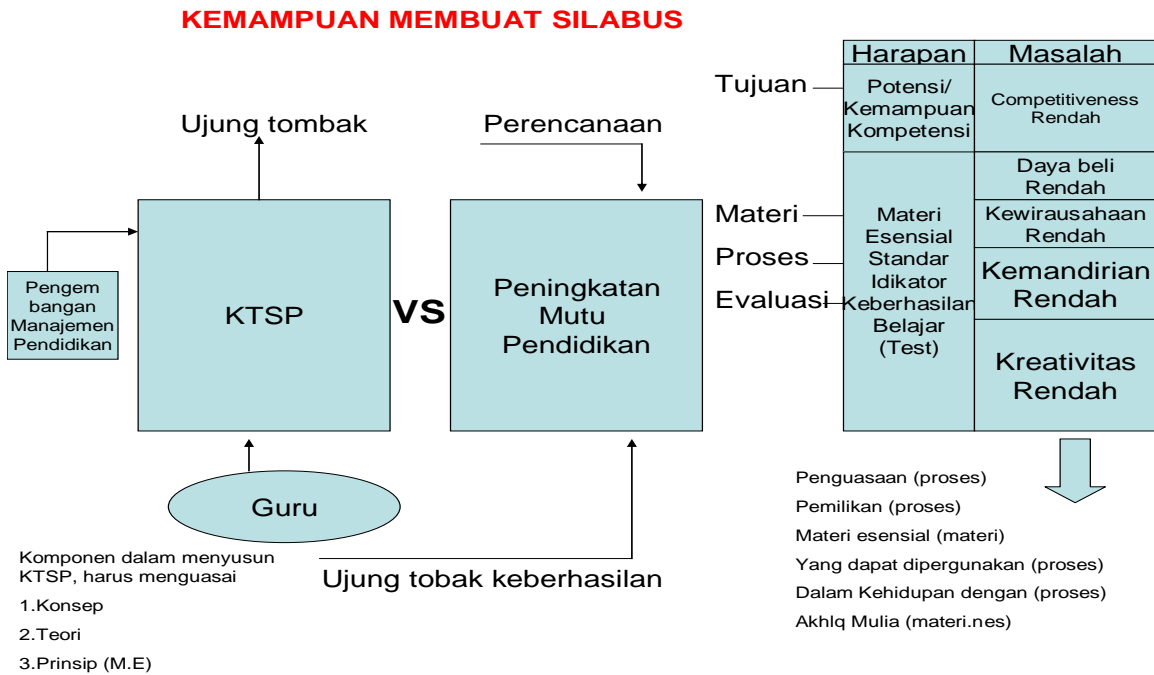
E = Esok dan hari ini

N = Niscaya tidak akan sia-sia

D = Dalam hati penuh kejujuran dan keikhlasan

A = Allah pasti melindungi kita

Sedangkan kemampuan guru dalam membuat silabus bisa dilihat dari gambaran dibawah ini sebagai berikut:



Pengembangan pengelolaan pendapatan daerah menjadi sebuah tren yang harus dilakukan optimalisasi, karena dari tahun ke tahun masalah APBN saat ini dalam situasi gonjang-ganjing pengaruh globalisasi sehingga penuh ketidak pastian, baik yang diakibatkan oleh turun naiknya harga BBM dunia, maupun pengaruh WTO, AFTA ataupun persaingan global yang semakin terbuka diperlukan *Renja* dari setiap pegawai di masing-masing tingkatan harus menjadi ujung tombak peningkatan *kapasitas fiskal* dalam formulasi pengelolaan keuangan daerah. Sehingga setiap pegawai menjadi ujung tombak pencapaian kapasitas fiskal yang progresif, proporsional dan profesional. Dengan ukuran pencapaian tujuan semua potensi pendapatan daerah menjadi komponen APBD yang signifikan terhadap penyediaan dana pembangunan di Kota Sukabumi dikelola oleh *kompetensi fiskus* yang mampu menunjukkan competitivipness dengan Kota dan Kabupaten lain di Jawa Barat.

Materi dari setiap komponen pendapatan daerah, khususnya dari komponen Pendapartan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang syah tidak menjadi penyebab biaya ekonomi tinggi sehingga tidak berimplikasi negatif pada dinamika perkembangan ekonomi daerah yang diformulasikan dalam LPE. Saat ini orang masih berfikir PAD dan APBD harus terus meningkat tanpa diimbangi dengan pemikiran bagaimana implikasi yang akan terjadi bila pajak dan retribusi terus ditingkatkan setiap tahun., sebab bagi setiap pengusaha kenaikan pajak akan berimplikasi pada harga dasar produksi yang dikenakan pada setiap konsumen.

Makanya standar proses dalam pendataan potensi pendapatan daerah harus riil tidak ditentukan diatas meja tapi berdasarkan reseach yang ilmiah, kemudian perhitungannya yang proporsional dalam sebuah aturan yang adil untuk ditetapkan dalam sebuah Surat Ketetapan Pajak Daerah tepat waktu dan tepat sasaran. Insya Allah tidak ada istilah SKPD ditolak atau tidak dibayar tepat waktu, tidak akan ada pendapat staf yang menyatakan bahwa pajak tahun yang akan datang ditarik untuk menutupi target tahun ini, tidak akan ada pernyataan verbalistik yang mengabaikan fakta dan data yang reliabel dan valid.

Proses pendataan, penetapan pajak dan penagihan pajak serta penyetoran pada kas daerah akan sesuai dengan *flow chat* yang standar, sehingga memudahkan untuk dievaluasi oleh siapapun dan kapanpun dengan ukuran yang standar pula sehingga tidak ada perbedaan persepsi yang bisa menggiring aparat pengelola pendapatan daerah berurusan dengan penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan ataupun KPK karena standar akuntasinya jelas, transparan dimengerti oleh semua pihak dan tidak akan menjadi buruan kuli tinta menjadi sebuah berita negatif yang menghebohkan di Negeri Republik Indonesia tercinta ini.

Kemampuan membuat renja yang terukur merupakan bukti keberpihakan pemberantasan KKN, jadi pemberantasan KKN itu tidak berdasarkan target siapa yang akan dibui tapi, seberapa besar potensi pendapatan bisa tergali untuk membiayai pembangunan, karena sekeras apapun pemberantasan korupsi disuarakan bila dana untuk membiayai pembangunan yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sangat minim karena *fiskusnya terganggu*, maka optimalisasi pendapatan daerah hanya merupakan retorika dan hiasan formulasi kata-kata indah yang enak didengar tapi sulit dilaksanakan sebab tidak ada ketenangan batin dari perbedaan persepsi antara teori dan praktek sehari-hari yang kusut tak berujung pangkal. Antara yang berkemaunan memperbaiki sistem dengan status quo yang sudah enak tidak ingin terusik.

Namun bila semuanya sudah terstandarisasi dengan renja yang terukur berdasarkan semua ilmu yang komprehensif dan tidak ada yang merasa lebih antara satu dengan yang lainnya, maka keterampilan semua pihak akan terdorong menuju visi yang akan dicapai bersama dan tidak hanya diukur dengan kemampuan verbalistik, melainkan sikap dan keterampilan mengacu pada ilmu yang koheren dan seimbang antara kognitif, afektif dan psikomotorik menjadi sebuah formulasi antar iman, ilmu dan amal menjadi (*Ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah*) dalam sosok manusia yang berakhlak mulia..... Bisakah itu tercapai! semuanya tergantung pada niat, kesempatan, dan kemauan dari para pembaca dan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).